

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DANA PIHAK KETIGA DAN
NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NENENG RATNA SARI

NPM : 1551020236

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019**

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DANA PIHAK KETIGA DAN
NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai lembaga intermediasi dalam penyaluran pembiayaan UMKM, dimana BPRS mempunyai peranan penting dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini adalah penelitian perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan study kasus pada BPRS di Indonesia, dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu CAR, DPK, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan statistic perbankan syariah, data bulanan rentan waktu 60 bulan, yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, dan teknik yang digunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis yang dilakukan uji t, uji f dan koefisien *determinasi* R^2 dengan taraf signifikan 5% dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Eviews 8. Hasil analisis secara simultan dengan tingkat signifikan 0,05 diketahui hasil uji regresi bahwa variabel *Capital adequacy ratio*, dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Ketiga variabel dalam penelitian ini mampu perubahan sebesar 91,17% sisanya 8.83% dipengaruhi variabel lainnya. Secara parsial dengan tingkat signifikan 0.05 variabel *Capital adequacy ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia. Variabel Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia dan variabel *Non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia. Sehingga H_{a1} diterima, H_{a2} dan H_{a3} diterima.

Kata kunci : CAR, DPK, NPF, Pembiayaan UMKM.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, DANA
PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Nama Mahasiswa : Neneng Ratna Sari

NPM : 1551020236

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241989031003**

Pembimbing II

**Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak
NIP. -**

Ketua Jurusan

**Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A.
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, DANA PIHAK KETIGA DAN NON FERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**

PERIODE 2013-2017, disusun oleh **Neneng Ratna Sari, NPM: 1551020236**

Jurusan Perbankan Syari'ah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : Any Eliza, S.E., M.Ak

(.....)

Penguji 1 : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M

(.....)

Penguji 2 : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak

(.....)

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, M.Sc

(.....)

Dekan



Dr. Enslah Abdul Ghofur, M.S.I
NIA INP068012003121001

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

(QS. *Al-baqarah*: 45)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya kehadirat Allah SWT serta salawat kepada nabi Muhammad SAW, atas selesainya skripsi ini. Dan rasa bangga amat dalam penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tersayang, teruntuk:

1. Ayahanda tercinta Samsudin dan Ibunda tersayang Mustini, yang tiada henti-hentinya berdo'a dan memberikan dukung baik secara materi maupun moral serta berjuang untuk keberhasilanku dan memberi cinta dan kasih sayang dalam mendidikku.
2. Kakakku Sri Sundari, Eis Kurnia Sari, adikku tersayang Satria Pajajaran, dan kedua keponakan Chella Mauchi dan Putra. Terima kasih atas kasih sayang dalam memberi semangat.
3. Keluarga kedua ku, tante Maya sari, om Karman, dan keponakanku Zulia Rahmawati, Asfa Fadyah Safiqoh. Yang telah mendoakan dan selalu mendukung dalam keadaan apapun, serta menhibur.
4. Sahabat tercinta dan seperjuanganku "the n3hpil" Heni Zelvia Beltha, Pipin Desmawati, lingga Elok Agustin, Novia Putri, Nafiatur Febriyanti (fia). Terima kasih selalu memberi semangat, selalu berada disisku dalam kondisi apapun, tanpa kalian aku kesepian, dan selalu mendengarkan keluh kesahku selama ini. Tanpa kalian aku bukan siap-siapa, dan terima kasih untuk persahabatan yang kita jalin selama ini, semoga persahabatan kita hingga ke jannah, aamiin.

5. sahabatku terkasih “gimik Squad” echa, adhe, ajeng dan nunun(nurul) terima kasih atas doa dan dukunganya yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat SMK yang tersayang Mesilia Noresa, Siska, Meilla terima kasih atas doa dan dukunganya dan selalu member semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung, yang aku banggakan tempatku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis Neneng Ratna Sari, dilahirkan di desa Gedung Sri Mulyo, Mesuji pada tanggal 01 Januari 1994, anak ketiga dari pasangan Bapak Samsudin dan Ibu Mustini. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) 03 Rejomulyo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Way Serdang dan selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan sekolah di SMK Kesehatan Mitra Bangsa dan selesai pada tahun 2013 dan mengikuti pendidikan perguruan tingkat tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2016.



Bandar Lampung, 31 July 2019

Yang Membuat,

Neneng Ratna Sari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH PERIODE 2013-2017”** Dalam penyelesaian skripsi penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Penelitian ini merupakan tugas akhir dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Raden Intan Lampung. Untuk itu dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan bimbingan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
2. Bapak Dr. Moh, Bahrudin, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam memberikan arahan serta kemudahan dalam membimbing dan selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A. dan bapak Muhammad Kurniawan M.E.Sy selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan perbankan syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan institute yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2015, khususnya Perbankan Syariah kelas D dan teman-teman KKN Tanjung Sari 1, Palas, Lampung Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk persahabatan yang tidak akan penulis lupakan.
8. Semua pihak yang mendukung dan memberikan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini dengan lancar.

Bandar Lampung, 27 juli 2019

Penulis

Neneng Ratna Sari

1551020236

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Perkreditan Rakyat Syariah	15
B. Pembiayaan	23
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	29
D. <i>Capital Adequacy Ratio</i>	36
E. Dana Pihak Ketiga.....	38
F. <i>Non Performing Financing</i>	42
G. Tinjauan Pustaka	42
H. Kerangka Pikir	46
I. Hipotesis.....	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	54
B. Populasi dan Sample Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Defenisi Operasional Penelitian	56
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Analisis Data	59
1. Uji Asumsi Klasik	60
a. Uji Normalitas	60
b. Uji Multikolinieritas	61
c. Uji Autokorelasi	62
d. Uji heteroskedasitas	62
2. Uji Hipotesis	62
a. Uji Koefisien Determinasi	63
b. Uji Secara Individual atau Persial	63
c. Uji Secara Serentak atau Simultan	64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskriptif Objek Penelitian	65
B. Analisis Data	68
C. Hasil Penelitian	73
D. Pembahasan	78

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Presentase Plafon Pembiayaan UMKM Periode 2013-2017	6
Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan golongan pembiayaan Periode 2013-2019 (dalam jutaan rupiah)	8
Tabel 1.3 Presentase <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Periode 2013-2017.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode 2013-2017	10
Tabel 1.5 Jumlah <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017.....	11
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.4 Hasil Autokorelasi.....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka berfikir 49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Excel Pengolahan Eviews 8
2. Uji Autokorelasi
3. Uji Heteroskedasitas
4. Uji Multikolinieritas
5. Uji Normalitas
6. Uji Regresi Linier Berganda
7. Surat Pernyataan
8. Surat Konsultasi
9. Surat Keputusan (SK)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia Periode 2013-2017* Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud yaitu :

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara variabel dengan variabel lainnya .¹
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah gambaran mengenai kemampuan Bank Syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya²
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh perbankan yang berasal dari masyarakat, masyarakat individu maupun badan usaha.³

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 39

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 257

³ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 43

4. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau ansuran yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁴
5. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁵
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi.⁶

Dengan penjelasan diatas, penulis dalam penelitian ini akan meneliti tentang keterkaitan atau pengaruh antara variabel-variabel dalam judul tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia.

⁴ *Ibid*, h.123

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), h. 41

⁶ David Wijaya, *Akutansi UMKM* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 8

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi sangat besar dan menjadi primadona disemua kalangan masyarakat Indonesia, dan semakin meningkat pembiayaan umkm sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan mengurangi pengangguran. modal yang dimiliki oleh BPRS dari tahun ketahun semakin meningkat, dan ada beberapa rasio yang mempengaruhi pembiayaan UMKM yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan *Non Performing Financing* (NPF). Penulis tertarik meneliti karena aspek-aspek tersebut sebagai factor dalam penentu penyaluran pembiayaan UMKM.

2. Secara Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, dan memberikan wawasan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan bagi pihak Bank Syariah lebih meningkatkan pembiayaan disektor UMKM.
- b. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, dan pokok pembahasan dalam skripsi ini sesuai ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam study Perbankan Syariah. Merupakan kajian ilmu yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, dalam Manajemen Perbankan .

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, Upaya menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu fokus pembangunan nasional karena apabila perekonomian Indonesia diletakkan dalam suatu kuadran, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian Indonesia berada pada perekonomian tradisional yang ditandai dengan sektor usaha kerakyatan yang bersifat *labor intensive*, yaitu sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).⁷

Dalam upaya mendorong pembangunan nasional, pemerintah memberikan dukungan yang komprehensif terhadap sector UMKM karena dengan memberikan dukungan kepada sekror UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan usaha bagi masyarakat dikalangan bawah dan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan lebih focus pada sector UMKM karena sector UMKM tahan terhadap krisis dan memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian.

Peran UMKM pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diragukan lagi. Karena jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56 juta unit dan menyumbang 60 persen dari total *gross domestic product* (GDP) dan menampung 97% dari total tenaga kerja pada tahun 2012.⁸

⁷ Siti Haura Ibtisamah, *Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Umkm* (Penelitian, 91 2017), 1.

⁸ Luthfia Fajriaty .*Pengaruh FDR,ROA dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (periode 2013-2017). Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund*, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutiyowati mengatakan jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit.⁹

Semakin meningkat pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pelaku usaha UMKM dapat mengurangi pengangguran di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia sangat besar dibandingkan dengan perusahaan lain. Produk UMKM yang dipasarkan adalah produk lokal dan UMKM juga memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Oleh karena itu UMKM memiliki kelebihan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang ada di Indonesia.

Kegiatan riset yang dilakukan UKM Center FEB UI yang berkaitan dengan dunia UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia di tahun 2018. Menurut riset mereka, perkembangan UMKM di tanah air mengalami dua hambatan utama, yakni kesulitan modal dan pemasaran. Permasalahan modal menghambat para pelaku UMKM untuk

⁹ “Jumlah Pelaku UMKM 2018” (On-line), tersedia di: <http://www.keuangan.kontan.co.id> (22 Februari 2019).

melakukan ekspansi usaha dan naik kelas. Permasalahan ini sangat terkait dengan urusan akses pembiayaan.¹⁰

Berdasarkan fakta riset UKM Center Feb UI masalah utama pelaku umkm adalah modal yang membuat ruang gerak pelaku usaha tidak bisa mengembangkan usahanya lebih luas lagi hal ini disebabkan oleh lembaga keuangan bank yang bersifat formal dan sulitnya syarat pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, oleh karena itu para pelaku UMKM memilih lembaga keuangan lainya yang memberikan pembiayaan dengan persyaratan mudah sebagai alternatif pembiayaan untuk menambah modal usaha pelaku UMKM. Dari beberapa permasalahan di atas maka bank sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit bank umum dan bantuan teknis pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu :

Tabel 1.1

Presentase Plafon Pembiayaan UMKM Tahun 2013-2019

Tahun	Presentase Plafon Pembiayaan UMKM Tahun 2013-2018
2013	Sesuai dengan kemampuan bank
2014	Sesuai dengan kemampuan bank
2015	Sekurang-kurangnya 5% dari total pembiayaan
2016	Sekurang-kurangnya 10% dari total pembiayaan
2017	Sekurang-kurangnya 15% dari total pembiayaan
2018	Sekurang-kurangnya 20% dari total pembiayaan
2019	Sekurang-kurangnya 25% dari total pembiayaan

Sumber : PBI No.14/22/PBI/2012

¹⁰ "Isu Pembiayaan Ekonomi Kreatif Dan Kreatif". (On-line), tersedia di: <http://www.ui.ac.id/berita/umkm-2018.html> (22 Februari 2019).

Pada tahun 2013 dan 2014, PBI menetapkan Plafon pembiayaan UMKM untuk perbankan sesuai dengan kemampuan masing-masing bank. Tahun 2015, plafon pembiayaan dinaikan 5% setiap tahunnya dan sampai 2019 bank harus memberikan plafon pembiayaan mencapai 25%.¹¹

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral memberikan dukungan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Bank dengan prinsip bagi hasil. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM dan dapat memberikan kontribusi peluang bagi nasabah UMKM dalam perluasan usaha serta meningkatkan perkembangan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian.

Dalam statistic Bank Indonesia, perkembangan bank syariah sangat memberikan kemajuan setiap tahunnya, yang dimana 5 tahun terakhir pembiayaan terhadap umkm flutuaktif dengan ditandai penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu:

¹¹ “Penetapan Plafon Pembiayaan”. (On-line), tersedia di: www.ojk.go.id (22 Februari 2019).

Tabel 1.2
Persentase Pembiayaan BUS, UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM (dalam milyaran)

Indikasi	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	32.904.000	33.904.000	26.650.000	28.675.000	28.973.000
UUS	5.521.000	6.301.000	6.732.000	8.334.000	8.895.000
BPRS	2.620.263	3.005.858	3.377.987	3.570.606	3.767.877

Sumber: statistic perbankan syariah

Dapat disimpulkan dari tabel 1.2 bahwa penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan umkm meningkat 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 penyaluran pembiayaan sebesar 2.620.263, sehingga pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 14,17% sehingga menjadi 3.005.858 dan pada 2015 mengalami peningkatan sebesar 12,38% menjadi 3.377.987 pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,70% menjadi 3.570.606 dan 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,52% menjadi 3.767.877 sehingga pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 2014 sampai 2017.

Bank Umum Syariah flutuaktif yaitu pada tahun 2013 sebesar 32.904.000 kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,14% menjadi 33.904.000, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 92,13% menjadi 26.650.000 dan pada 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,60 % menjadi 28.675.000 lalu 2017 mengalami peningkatan menjadi 28.973.000.

Unit Usaha Syariah dalam menyalurkan pembiayaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 5.521.000 lalu pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 6.301.000, tahun 2015 sebesar 6.732.000 dan pada tahun 2016 sebesar 8.334.000 sampai 2017 sebesar 8.895.000 ini dikarenakan semakin meningkatnya dana pihak ketiga sehingga pembiayaan pun meningkat setiap tahunnya dan dan flutuaktif karena dalam penyaluran pembiayaan BPRS menerapkan prinsip hati-kehatian. Dari ketiga lembaga perbankan yaitu BUS, UUS dan BPRS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM akan tetapi dari ketiga lembaga tersebut dalam Penyaluran pembiayaan UMKM penyaluran BUS paling besar dalam menyalurkan pembiayaan, setelah BUS ada UUS yang cukup besar dalam penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan BPRS. Lalu pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kecil dibandingkan dengan BUS dan UUS ini dikarenakan modal BPRS masih Kecil untuk skala pembiayaan yang besar. Akan tetapi BPRS sebagai lembaga intermediasi yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang ditandai dengan penyaluran pembiayaan setiap tahunnya meningkat.

Dalam strateginya operasionalnya BPRS tidak bersifat menunggu akan tetapi lebih aktif bersosialisasi terhadap para pelaku usaha UMKM yang dapat diberikan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang bagus, serta BPRS juga memilih jenis usaha yang waktu perputaran usahanya jangka pendek dengan mengutamakan skala usaha menengah

kecil dan bprs juga melihat pansa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya kepada produk yang akan diberikan pembiayaan¹²

Adapun pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Berdasarkan golongan pembiayaan yaitu :

Table 1.3
Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan
Golongan Pembiayaan Tahun 2013-2017 (Rp juta)

Golongan pembiayaan	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha kecil dan menengah	2.620.263	3.005.858	3.377.987	3.570.606	3.767.877
Selain usaha kecil dan menengah	1.813.230	1.999.051	2.387.184	3.091.950	3.996.74

Sumber: statistic perbankan syariah 2013-3017

Berdasarkan dari data dia atas maka pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kepada nasabah meningkat dari tahun ketahun. Dalam pengembangan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS dalam penelitian ini di pengaruhi oleh tiga faktor yang pertama modal yang dimiliki oleh BPRS. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal sebesar 8% dari asset tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR).¹³ Berikut ini data CAR pada tahun 2013-2017

¹² Ismail, Perbankan Syariah (Jakatrta: Prenada Media Grup,2016), h. 55

¹³ “Peraturan Bank Indonesia”. (On-line), tersedia di: www.bi.go.id, (24 Februari 2019)

Table 1.4
Presentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017

Tahun	Persentase (%)
2013	22,08
2014	22,77
2015	21,47
2016	21,73
2017	20,81

Sumber : statistic perbankan syariah 2013-3017

Berdasarkan data diatas, perkembangan CAR cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 persentase CAR mengalami kenaikan 0.69% dibandingkan 2013 yaitu 22,08% menjadi 22,77 %. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,3%. pada tahun 2016 CAR mengalami kenaikan kembali sebesar 0,26%. Dan pada tahun 2017 CAR kembali mengalami penurunan sebesar 0,92%.

Menurut teori Muhammad, Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar modal yang dimiliki oleh bank. Dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan semakin meningkat.¹⁴

Selain modal yang mempengaruhi pembiayaan ada juga Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mempengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM. BPRS menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran. Semua dana yang didapat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terpenting bagi kegiatan

¹⁴ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 271

operasional yang berasal dari sumber dana pihak ketiga (DPK). Sebagai berikut dana pihak ketiga (DPK).

Tabel 1.5
Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Perkreditan
Rakyat Syariah pada tahun 2013- 2017

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK)
2013	3.666.174
2014	4.028.415
2015	4.801.888
2016	5.897.239
2017	6.987.280

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013-2017

Berdasarkan data di atas, dana pihak ketiga semakin meningkat dari tahun-ketahun, berarti masyarakat sudah percaya menginvestasikan dananya kepada bank perkreditan rakyat syariah. Menurut Achmad semakin meningkat dana pihak ketiga maka semakin meningkat dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan DPK yang dimiliki oleh bank meningkat.

Pembiayaan UMKM semakin meningkat pada BPRS ini disebabkan oleh faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini merupakan factor dari penentu pembiayaan UMKM pada BPRS yaitu CAR dan DPK meningkat secara Signifikan .

Ada factor lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembiayaan UMKM yaitu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) karena pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tidak semua sehat tetapi ada juga yang bermasalah seperti kredit macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, secara netto lebih dari 5% dari total kredit dan penyelesaiannya, bersifat kompleks jika pembiayaan bermasalah akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang akan mengakibatkan kerugian dan berhentinya operasional karena bank syariah masih memiliki modal yang kecil. Adapun data *Non Performing Financing* (NPF) tahun 2013-2017.

Tabel 1.6
Persentase jumlah Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017

Tahun	Persentase (%)
2013	6.50
2014	8.97
2015	8.20
2016	8.63
2017	9.68

Sumber : Statistic Perbankan Syariah 2013-2014

Berdasarkan data diatas pada tahun 2014 NPF mengalami peningkatan sebesar 2,47% yang awalnya 2013 sebesar 6.50% menjadi 8.97 % pada tahun 2014. Tahun 2015 mengalami penurun sebesar 0.77%, sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang sangat

signifikan hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kepada nasabah.

Non Performing Financing (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar seluruh atau sebagian kewajiban yang sudah disepakati di awal.¹⁵ Dalam jurnal Wuri Arianti N.P dan Harjun Muharam menurut teori Syafi'i Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka, akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan dan akan menyebabkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat menurun. Sebaliknya samkin rendah NPF maka semakin tinggi permintaan pembiayaan oleh masyarakat.¹⁶

Beberapa penelitian tentang CAR, DPK dan NPF terhadap pembiayaan UMKM menunjukkan perbedaan hasil peneletian secara positif dan negatif yaitu:

Jamilah (2016) Ahmira Nahrawi (2017), dan Mahda Afsari (2017) mengatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Dan Wuri Arianti (2011), Eva Nurul Khasanah (2018) dan Luthfia Fajriati (2018) mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM, menurut Eva Nurul

¹⁵ H.Muklis/ Thoatul wahdaniyah. *Pengaruh DPK, Inflansi, Dan NFP Terhadap Pembiayaan UKM*, studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013. Jurnal Islaminomic Vol .v. No.2, Agustus 2016

¹⁶ Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (periode 2013-2017). Skripsi Universitas Islam Raden Intan, Lampung.

Khasanah, Luthfia Fajriati dan Wuri Arianti CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM. Karena CAR Modal digunakan untuk mengantisipasi serta menampung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh operasional Bank dan CAR juga digunakan sebagai indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva yang beresiko, sehingga CAR tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam penyaluran pembiayaan

Selanjutnya Eva Nurul Khasanah (2018) Cahya (2013) dan Mukhlis dkk (2016) mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Dan Debby dan Ayu (2018) mengatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Menurut debby dan ayu Dana pihak ketia tidak berpengaruh karena adanya pembengkakan pembiayaan yang lain terjadi seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah sehingga mengharuskan bank banyak mengeluarkan pembiayaan yang cukup besar.

Selanjutnya: Ahmira Ahmad Nahrawi (2017), Mukhlis (2017), dan Luthfia Fajriaty (2018) mengatakan bahwa *Non Performing financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM . Dan Eva Nurul Khasanah (2018) dan Wuri (2017) yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan sector UMKM. menurut Eva dan Wuri NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan karena tingginya NPF tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan karena bank lebih banyak mengalokasikan dananya ke pembiayaan lain dan NPF tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian jika penelitian terdahulu menggunakan Perbankan Syariah, BNI Syariah, Bank Umum Syariah, sedangkan peneliti menggunakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Adapun variabel Independen (x) penelitian terdahulu yaitu X_1 dana pihak ketiga, X_2 Inflansi, X_3 *non performin financing* dan X_4 *capital adequacy ratio* sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel (X) yaitu X_1 *capital adequacy ratio* X_2 dana pihak ketiga X_3 *non performin financing*

Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode 2013-2017. Alasan mengambil BPRS karna pembiayaan yang disalurkan BPRS 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan walaupun dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS lebih besar dari pada BPRS.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas serta beberapa hasil penelitian terdahulu yang saling kontradiksi dan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kepada nasabah UMKM dari 2013-2017 mengalami peningkatan dan factor yang mempenaruhi pembiayaan UMKM yaitu CAR, DPK dan NPF juga meningkat. sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finnacing* Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini lebih fokus dan tepat sasaran pada permasalahan yang akan diteliti maka akan dibatasi oleh variabel-variabel yang akan dipengaruhi Pembiayaan UMKM. Variabel-variabel tersebut yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2013-2017?
2. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2013-2017?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF)

berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia periode 2013-2017

2. Untuk mengetahui Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan UMKM pada bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia periode 2013-2017

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rinci sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah pada bank perkreditan rakyat syariah dalam menyalurkan pembiayaan UMKM.

2. Bagi lembaga keuangan syariah

Sebagai sumber informasi bagi pihak bank perkreditan rakyat syariah dalam penyaluran pembiayaan UMKM, dan dapat meningkatkan strategi dalam memberikan pembiayaan UMKM

3. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Sebagai sumber informasi dalam pembiayaan UMKM dapat memilih lembaga keuangan syariah yang sehat sebagai tempat alokasi dana dan dapat meningkatkan pembiayaan UMKM.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan *banco* dari bahasa *Italia*, yang berarti peti/lemari atau bangku. Dan kata peti mengisyaratkan kata peti atau tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti emas, berlian¹⁷ dalam al-qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplis. Tetapi yang dimaksud adalah suatu unsure-unsur seperti struktur manajemen, fungsi hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti Zakat, sadaqah, ghaminah(rampasan perang), ba'i (jual beli), dayan (utan dagang), maal (harta).yang memiliki fungsi dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2012), h. 29.

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸

Mengenai jenis dan kegiatan bank umum syariah telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam undang-undang RI No 21 tahun 2008 pasal 19 berdasarkan pasal 19 kegiatan Bank Umum Syariah mencakup :

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyaurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah, akad salam dan akad istisnah

¹⁸ "Peraturan Bank Indonesia" (On-line), tersedia di www.bi.go.id (9 oktober 2019)

- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.¹⁹

Adapun kegiatan unit usaha syariah yaitu:

- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

¹⁹ "Peraturan Bank Indonesia". (On-line), tersedia di www.bi.go.id, (9 oktober 2019)

- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

1) Penertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Menurut surat Keputusan Direktur Bank Indonesia, No 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2015), h. 93

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

Kesimpulan dari pengertian BPRS di atas adalah Bank yang menjalankannya operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan pembiayaan yang terbebas dari riba. Menurut undang-undang Perbankan Syariah yang merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Dalam penjelasan pasal 2 yaitu :

- a. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadlh), dalam transaksi pinjaman yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas karena berjalanya waktu (nasi'ah).
- b. Maisir adalah transaksi yang mengantungkan dalam suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas dan tidak tau kebenarannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram adalah transaksi yang dilarang dalam syariah

²¹ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Aura, 2016), h. 34

- e. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidak adailan bagi bagi pihak lainnya.²²

Adapun yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (Q.S. Al-Baqarah : ٢٧٥)

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (QS. Al-Baqarah : 275)

²² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 16

Allah mengizinkan atau menghalalkan memperoleh keuntungan, tetapi yang berasal dari perdagangan dan melarang riba, mendorong aktivitas keuangan di dalam ekonomi Islam terhadap asset yang berasal dari bisnis dan transaksi. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh transaksi keuangan harus menyajikan transaksi yang nyata atau penjualan atas barang dan jasa, sehingga meraih keuntungan. sebagai penambahan, Islam juga menetapkan moral atau perilaku yang hampir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di dunia.²³

2) Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Dalam fungsinya BPRS hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.²⁴

a. Menghimpun dana masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadiah, mudharabah, dan deposito mudharabah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan, dan besaran bonus sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak bank perkereditan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah. Jadi kesimpulan BPRS hanya menghimpun dana dan tidak melayani pembayaran, dan bagi hasil sesuai dengan akad di awal.

²³ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financing Management* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
h. 133

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 54

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

BPRS menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dengan melakukan penyaluran dana pihak bank memperoleh keuntungan yang berasal dari penyaluran akad jual-beli dan pembiayaan kerja sama usaha.

3) Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Adapun tujuan dari BPRS yaitu :²⁵

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, yang ada dipedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama tingkat kecamatan, dapat mengurangi urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* dalam meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah diperlukan strategi operasional yaitu :

- 1) BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya fasilitas, tetapi bersifat aktif melakukan sosialisasi/ penelitisn pada usaha-usaha yang bersifat kecil yang dapat diberikan bantuan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang lebih baik.

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah....* h. 95

- 2) BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uang jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPR Syariah melihat pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya kepada produk yang akan diberikan pembiayaan.

4. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah BPRS dalam memberikan jasa-jasa keuangan yang sama dengan bank umum syariah. Dalam usaha dana masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam memberikan jasa keuangan yaitu :²⁶

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
 - a) Pembiayaan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau isthisna.

²⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 37

- c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - d) Penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah*
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bank umum konvensional, dan UUS
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lain yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selain melakukan kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, adalah menerima dana dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, atau dana social dan yang berhak menerima santunan atau pinjaman kebijakan (*qardhul basan*). Penyaluran dana kepada masyarakat Bank Perkreditan Rakyat Syariah memberikan jasa-jasa keuangan yaitu :

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah menggunakan *akad* dengan nasabah (pengusaha). Bank memberikan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola pengusaha. Dan keuntungan diperoleh akan dibagi (sesuai dengan kesepakatan bagi hasil) sesuai dengan akad yang disepakati pihak bank dan nasabah.²⁷

2) Pembiayaan musyarakah

Dalam pembiayaan ini pihak bank dan pengusaha mengadakan perjanjian. Perjanjian antara bank dan pengusaha sama-sama memberikan modal dan dikelola secara bersamaan dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

Menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998, bank perkreditan rakyat syariah hanya dapat melakukan usaha-usahanya yaitu :

1. Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu :

- a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
- b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
- c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*

2. Melakukan penyaluran dana melalui :

- a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip yaitu *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, jual-beli lainnya.

²⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 122

- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsipnya yaitu *mudharabah, musyarakah*. bagi hasil lainnya.

Pembiayaan lain berdasarkan prinsip yaitu : Rahn, Qard. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari'ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. menurut Bank Indonesia aktiva produktif adalah pembiayaan piutang qardh, surat berharga syari'ah, penempatan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening *administrative* serta sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2013).

4. Perbedaan BUS , UUS dan BPRS

Perbedaan bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyat syariah berdasarkan undang-undang peraturan Bank Indonesia no 13/3/pbi/2009 bank umum syariah dan 11/10/pbi/2009 untuk unit syariah yaitu

- Persyaratan pembukaan

- a) Bank Umum Syariah

Memegang izin dari Bank Indonesia modal awal pembukaan 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) milik warga negara indonesia/badan hukum indonesia/pemerintah daerah bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal Rp.1 triliun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.

b). unit usaha syariah

memegang izin bank Indonesia modal kerja minimal 100.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan dalam bentuk tunai. Pembukaa uus harus masuk kedalam rencana Buk. Buk yang tekah mendapat izin usaha uus wajib mencantumkan secara jelas frase “unit usaha syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan

c). Bank Perkreditan Rakyat Syariah

- Warga negara Indonesia
- Pemilik tidak termasuk kedalam daftar orang tercela dan memiliki intergritas sebagaimana yang telah diatur dalam Bank Indonesia.
- Dimiliki oleh dua pihak atau lebih modal yng harus disetor sekurangnya-kurangnya sebesar 2.000.000.000 untuk BPR
- RP 1.000.000.000(Satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah ibu kota propinsi
- Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk bprs yang didirikan diluar wilayah
- Harus mendapat izin direksi Bank Indonesia

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan²⁸

Jadi pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk mendukung perencanaan usaha yang telah direncanakan nasabah dan bank sebagai pihak penyalur modal.

Menurut undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penedialan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Falsafah pembiayaan di Bank Syariah, pembiayaan adalah kerjasama antara pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu aspek Syariah dan aspek ekonomi. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank harus berpedoman pada bank islam (tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam bidang usaha yang

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*...., h. 41

halal) dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.²⁹

2. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk menambah modal nasabah untuk meningkatkan usahanya. Dengan diberikan pembiayaan mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan bank kepada nasabah memiliki dapat meningkatkan makro ekonomi, setelah pengusaha mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang ,mengelola bahan baku menjadi barang jadi, serta meningkatkan volume perdagangan.

Adapun pembiayaan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:³⁰

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang didirikan memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencari laba maksimal. untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungn dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba mkasimal, resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

²⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah....*, h. 314

³⁰ *Ibid.* 41

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumberdaya manusia serta sumberdaya modal.
- d. Penyaluran kelebihan daya, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Manfaat Pembiayaan

Ada beberapa manfaat pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha yaitu : ³¹

a. Manfaat pembiayaan bagi Bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada bank akan mendapatkan keuntungan bagi bank berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, sesuai dengan kesepakatan penjanjian akad diawal melakukan pembiayaan
- 2) Pembiayaan akan meningkatkan profitabilitas bank, hal ini dapat dilihat dari peningkatan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan meningkatkan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah seperti produk jasa dan dana.

³¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*..., h. 110

Kewajiban debitur dengan membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum melakukan pembiayaan. Karena secara tidak langsung pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah telah memasarkan produk pendanaan maupun produk jasa bank.

- 4) Dengan adanya pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami aktivitas usaha para nasabah dan memahami sector usahasesuai dengan jenis usaha.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah.dengan adanya pembiayaan dari bank dapat memperluas volume usaha nasabah.
- 2) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- 3) Bank juga dapat memberikan fasilitas kepada nasabah misalnya dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lain yang dibutuhkan nasabah.
- 4) Jangka waktu berdasarkan kemampuan nasabah dalam membayar dan jenis pembiayaan, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan sebagai pendorong pertumbuhan sector riil, karena uang yang ada di bank disalurkan kepada pelaku usaha dan pembiayaan yang diberikan untuk investasi dan modal kerja, dapat meningkatkan volume produksinya akan meningkatkan volume usaha yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional.
- 2) Pembiayaan juga sebagai alat pengendali moneter.pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga harus barang juga bertambah.
- 3) Pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan memperoleh pembiayaan dari bank syariah nasabah dapat meningkatkan volume usaha,sehingga dapat menyerap jumlah tenaga kerja akan meningkat pendapan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapan nasional.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dapat meningkatkan pendapan Negara, seperti pendapatan pajak yaitu pajak pendapatan dari bank bank dan pajak pendapatan dari nasabah.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah.
- b. Mitra usaha/patner adalah orang yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.
- c. Kepercayaan bank syariah memberikan kepercayaan kepada mitra yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
- d. Akad adalah suatu kontrak kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah.
- e. Resiko adalah pembiayaan yang disalurkan bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana.resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan kredit macet dan dana tidak kembali.
- f. Jangka waktu merupakan periode yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan bank syariah, jangka waku yang bervariasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Waktu pembayaran jangka pendek 1 tahun, jangka menengah waktu yang diperlukan 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang adalah pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

- g. Balas jasa adalah nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad di awal perjanjian.

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian umkm adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum.³²

Berdasarkan Undang Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Yaitu :³³

- a. Bab II asas dan Tujuan pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Bab VI pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah, mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan.
- c. Bab VII Pembiayaan dan Pinjaman Pasal 22 menjelaskan dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan usaha kecil. Pemerintah melakukan upaya: pengembangan sumber

³² David Wijaya, *Akutansi UMKM*...., h. 8

³³ “Peraturan Undang-Undang Tentang UMKM”. (On-line) <https://www.ojk.o.id> (20 Januari 2019)

pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

Bentuk UMKM berupa perusahaan perorangan, persekutuan (Firma dan Cv), serta perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga jenis sesuai kriteria berdasarkan jumlah asset dan omzet seperti tercantum dalam Undang Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:³⁴

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset \leq Rp50 juta dan omzet \leq Rp300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang atau perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp50 juta < asset \leq Rp 500 juta dan Rp 300 juta < omzet \leq Rp 2,5 milyar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha

³⁴ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), h. 126

besar yang memenuhi criteria $\text{Rp}500 \text{ juta} < \text{asset} \leq \text{Rp}2,5 \text{ milyar} < \text{omzet} \leq \text{Rp}50 \text{ milyar}$.

Jumlah usaha makro, kecil, dan besar terdapat dalam setiap sector ekonomi sehingga paling berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional. Dalam upaya agar masyarakat dari semua lapisan masyarakat berperan dalam pembangunan, dan pemerintah berupaya untuk memenuhi beberapa program bantuan melalui fasilitas perkreditan, bagi pengusaha mikro dan kecil dan menengah.

Berdasarkan undang-undang pasal 5, UMKM yang menyebutkan, bahwa tujuan pemerdayaan UMKM antara lain :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berimbang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta
- c. Meningkatkan para usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan penuntasan rakyat dari kemiskinan.

UMKM di Indonesia dapat bertahan pada masa krisisn ekonomi disebabkan oleh empat hal, yaitu:³⁵

- a. Sebagian umkm menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama.

³⁵ *Ibid.* h. 124

- b. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada nonbanking financing dalam aspek pendanaan modal.
- c. Pada umumnya, UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu.
- d. Terbentuknya UMKM sebagai akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja di sector formal.

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi factual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan didalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda diantara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang)
- 2) Usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang)
- 3) Serta usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

1. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Perkembangan usaha mikro dan kecil merupakan aspek penting dalam permasalahan, mengingat lebih dari 51 juta usaha yang ada, atau lebih dari 99,9% pelaku usaha adalah usaha mikro dan kecil. pada umumnya, berupa badan usaha perorangan, usaha yang dikelola.

Ada dua permasalahan UKM:

a. Masalah *financial* yaitu :³⁶

- 1) Kurangnya kesesuaian (terjadi *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM.
- 2) Tidak ada pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM.
- 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
- 4) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- 6) Banyak UKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan *manajerial* dan *financial*

b. Masalah organisasi manajemen (*non-financial*) yaitu :

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

³⁶ Ira Maya Hapsari, “Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi oleh Ukm dan Peninjauan Kembali Regulasi Ukm Sebagai Langkah Awal Revitalisasi Ukm”, jurnal fermana, Volume v, No 02, 2014.

- 2) Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh UMK mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMK untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

2. Perbankan sebagai lembaga intermediasi bagi pelaku usaha

Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Kemajuan bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut.

Adapun Peranan bank dalam mengembangkan UKM (usaha kecil dan menengah) yaitu penyedia dana untuk kelangsungan kegiatan usaha. peran lainya bank juga melakukan pendampingan dan pembinaan pada UKM agar dapat melakukan pengembangan usahanya. ini disebabkan karena pelaku UKM kesulitan dalam mengendalikan penggunaan kredit yang didapat dari pembiayaan bank akibat perencanaan yang kurang matang.³⁷

³⁷ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan....*, h. 20

Bank islam tetap berkomitmen untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan porsi untuk pembiayaan ukm yang konsisten pada level 70% dari level portofolio pembiayaan yang diberikan. Sector UKM merupakan sector dengan imbal hasil yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan korporasi, akan tetapi dengan imbal hasil yang tinggi maka akan berpotensi resiko juga tinggi. Bank islam mampu mengelola segmen ini dengan lebih baik, bukan tidak mungkin predikat bank dengan pembiayaan mikro terbaik dapat diambil alih dari BRI, selain infrastruktur untuk mampu menjemah sector UKM, dimana lazimnya ada didaerah urban, sistem manajemen resiko bank islam perlu disiapkan untuk menimalisasi risiko salah pilih (*adverse selection*) dan menekan pengawasan yang diperlukan.³⁸

3. UMKM dalam perspektif Islam

Islam memang memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*interpreneurship*) ini, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat. Islam menunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Yang terdapat pada ayat al-qur'an dan hadist yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini.³⁹

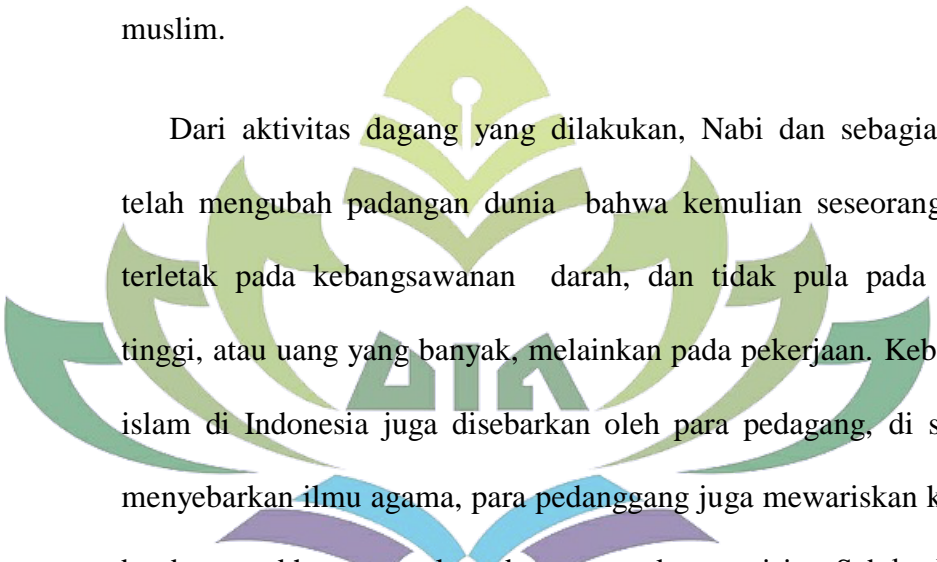
Bekerja merupakan esensi kewirausahaan dari kewirausahaan.

Prinsip kerja keras. Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko

³⁸ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 85

³⁹ [Hhttp://Wirausahaanet.Tripod.Com/](http://Wirausahaanet.Tripod.Com/) di Akses Pada 28 September 2019, pukul 21.42 wib

akan memperoleh peluang rezeki yang besar. Dalam sejarah nabi Muhammad, istrinya dan sebaian besar sahabatnya adalah pedagang dan *entrepe* mancanegara yang pawai. Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Dan tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental enterprenewship inheren denan jiwa umat islam itu sendiri. Bukanlah islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan seluruh dunia setidaknya sampai abad ke-13 M, oleh para pedagang muslim.



Dari aktivitas dagang yang dilakukan, Nabi dan sebagian besar telah mengubah padangan dunia bahwa kemulian seseorang bukan terletak pada kebangsawanan darah, dan tidak pula pada jabatan tinggi, atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan. Keberadaan islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang, di samping menyebarkan ilmu agama, para pedanggang juga mewariskan keahlian berdagang khususnya kepada masyarakat pesisir. Sabda Nabi “hendaklah kamu berdagang karena didalamnya terdapat 90 persen pintu rizki”.

UMKM sangat erat hubunganya dengan berdagang, berusaha atau berdagang suatu anjuran kepada umat islam. Menurut penulis bahwa Allah menciptakan Rasul untuk berdagang dan sebagai panutan oleh umat islam untuk mengikuti jejak rasul yaitu berdan karena denan berdagang akan meningkatkan rejeki yang dimana nabi bersabda

bahwa ada 90 persen rizki dari berdagang dan rasul juga mendoakan para pelaku bisnis atau para pedagang yang jujur.

Dalam dasar hukum UKM dijelaskan didalam Al-Qur'an surah AL-Hasyr ayat 7 yaitu :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertawalahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

Menurut para pakar, disebutkan bahwa Allah SWT melaran perputaran harta (modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat ini maka dapat diambil pelajaran bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelompok menengah-bawah yang notabnya mayoritas penduduk di suatu Negara. Rasulullah SAW dalam menyatakan: “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa diantara kalian.” Oleh karena kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah dinegeri ini dengan mengembangkan UKM secara bersama-sama. Dan study yang

dilakukan Michigan State University, AS. disimpulkan Negara, dan diteaskan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan dan UMKM sendiri tahan terhadap krisis moneter sehingga UMKM sendiri tidak diragukan lagi dalam kontribusi terhadap pembiayaan UMKM⁴⁰

D. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan informasi yang dianggap mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial⁴¹

Sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk mencantumkan angka-angka rupiah dan persentasenya (kuantitatif) yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau perbankan. Dan laporan ini digunakan untuk menilai kinerja dari perusahaan atau perbankan tersebut. Baik tidaknya kondisi perusahaan atau perbankan dapat dilihat melalui angka-angka tersebut.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk melihat posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta

⁴⁰ M. Umar Chapra, *Islamic and Economic Development* (Yogyakarta: Media Persindo, 2009), h. 21

⁴¹ Farid Harianto, Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 1998) h. 179

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka⁴²

Pernyataan standar akuntansi keuangan 101: penyajian laporan keuangan syariah adapun PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum laporan keuangan syariah antara lain yaitu:⁴³

- Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK
- Dasar aktual
- Materialistis dan penggabungan
- Saling hapus
- Frekuensi pelaporan
- Informasi kompratif
- Konsistensi penyajian

Rasio keuangan bank syariah menurut glosarium ekonomi, rasio adalah sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban selanjutnya dan digunakan sebagai bahan kajian untuk analisis dan keputusan dan semua didasari oleh data-data yang tersedia.⁴⁴ Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Adapun beberapa rasio keuangan yaitu :

⁴² Tim Perumus PAPI, Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), h. 5

⁴³ [http:// E-Commerce.laiglobal.Or.Id](http://E-Commerce.laiglobal.Or.Id) (9 Oktober 2019)

⁴⁴ Irfhb Fahmi, *Glosarium Ilmu Manajemen Akutansi* (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 222

1. Capital Adequacy Ratio

a. Pengertian Capital Adequacy Ratio

Kecukupan modal bank menunjukkan bahwa bank dalam keadaan yang dinyatakan kedalam suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:

- 1) Dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga
- 2) Dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Modal merupakan factor terpenting dalam perkembangan bank dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan meningkatkan *profitabilitas*. Dengan ditetapkannya ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), untuk bank di seluruh dunia rasio yang ditetapkan sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.⁴⁵

Adapun rumus dalam kecukupan modal yaitu :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

⁴⁵ Ferry, *Manajemen Rasio Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 69

Adapun rincian permodalan dari bank ada dua yaitu ⁴⁶

a. Modal inti

Modal yang terbentuk dari modal disetor dan modal inti yaitu :

- 1) Modal setor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- 2) Agio saham adalah selisih lebih dari harga saham dari nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, adalah modal yang didapatkan kembali dari saham
- 4) Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah pajak oleh RUPS tidak untuk dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan oleh RUPS.
- 8) Laba tahun berjalan adalah laba sebelum pajak yang didapatkan dari tahun lalu
- 9) Bagian kekayaan bersih perusahaan pada laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti pada anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan bank pada anak perusahaan.

⁴⁶ Khaerul Uman, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 251

b. Modal pelengkap

Modal pelengkap yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang dipersamakan dengan modal.

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklafikasikan
- 3) Modal pinjaman
- 4) Pinjaman subordinasi

b. Hubungan CAR dengan Pembiayaan UMKM

CAR merupakan rasio kemampuan dalam permodalan bank dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha nasabah dan menggung resiko yang diakibatkan oleh resiko operasional bank. Semakin besar nilai CAR, maka semakin lancar bank dalam menyalurka kredit semakin besar rasio maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan posisi keuangan baik.⁴⁷

2. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.⁴⁸ Jadi dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat dan badan usaha digunakan untuk kegiatan operasional bank. Bank menawarkan

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*, h. 117

⁴⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 43

produk simpanan dalam bentuk penghimpunan dananya. Ada tiga bentuk sumber dana dari pihak ketiga yaitu : Simpanan giro, Tabungan (*saving*), Deposito (*time deposit*)

- 1) Simpanan giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan bilyet giro dan cek.
- 2) Tabungan (*saving*) adalah simpanan yang penarikannya sesuai dengan ketentuan dari pihak bank, dan setelah perkembangan penarikan boleh dilakukan dengan sarana penarikan di ATM.
- 3) Deposito (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat diambil setelah melawati waktu yang disepakati

Dalam perhitungan dana pihak ketiga menggunakan rumusan dalam dana pihak ketiga yaitu :

$$DPK = \frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} \times 10\%$$

Bank syariah dapat menarik dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk yaitu⁴⁹

- 1) Titipan (wadi'ah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalian (*guaranteed deposit*) tidak mendapatkan imbalan dan keuntungan.
- 2) Partisipasi modal berbagai hasil dan resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investmen*)

⁴⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), h. 58

account/mudharabah mutlaqoh) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang diberi modal.

- 3) Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayaddah*) bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*.

Dana yang terkumpul dari masyarakat sesuai dengan fungsinya *intermediary* bank berkewajiban menyalurkan pembiayaan. Adapun tujuan dari alokasi dana sebagai berikut : ⁵⁰

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank dengan menjaga supaya posisi likuiditas tetap aman.

Agar tercapai alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kepentingan nasabah terpenuhi. alokasi penggunaan dana bank syariah ada dua yaitu :

- 1) Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

b. Sumber-sumber dana Bank Syariah

Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak semua berasal dari bank melainkan ada sebagian dana dari masyarakat dalam bentuk titipan

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*...., h. 271

yang sewaktu-waktu dapat diambil. Dalam data empiris data yang dimiliki bank ditambah dengan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank sebesar 7% samapi 8% dari total aktiva. dan rata-rata jumlah modal yang dimiliki oleh Bank-bank di Indonesia belum pernah mencapai 4% dari total aktiva. Adapun Sumber dana bank syariah yaitu :⁵¹

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

sumber ini meruapkan sumber dana dari modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang saham, Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedankan kebutuhan dana masih, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Dan phak bank jua dapat menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a) Setoran modal dari pemegang saham
 - b) Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham.
 - c) Laba bank yang belum dibagi, laba yang memang belum dibagi
- 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumberdana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan

⁵¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 65

bank jika mampu membiayai operasional dari sumber dana.

Sumber dana dari masyarakat luas yaitu :

- a) Simpanan giro
- b) Simpanan tabungan
- c) Simpanan deposito

3). Dana yang bersumber dari lembaga lainya

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama dan kedua. Pencarian sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

2. hubungan DPK terhadap pembiayaan UMKM

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, individu maupun badan usaha, sehingga dana pihak ketiga dapat digunakan untuk kegiatan operasional bank syariah. Menurut teori Muhammad “semakin meningkat dana pihak ketiga yang terkumpul, maka semakin meningkat dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada nasabah”⁵²

3. *Non Performing Financing* (NPF)

- a. Pengertian *Non Performing Financing* NPF adalah pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat

⁵² Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 271

melakukan pembayaran atau ansuran yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁵³

Jadi NPF adalah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah membayar kredit yang telah disepakati diawal. Berdasarkan criteria yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun rumus *non performing financing* yaitu

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Pembiayaan bermasalah}} \times 100\%$$

b. Hubungan NPF dengan pembiayaan UMKM

Menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya merupakan hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dan jika NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat, semakin ketat pembiayaan yang disalurkan bank akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat menurun.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, h.123

⁵⁴ Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

H. Tinjauan Pustaka

Adapun Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Luthfia Fajriaty, yang berjudul “Pengaruh FDR,ROA dan CAR terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia.(periode 2013-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF berpengaruh secara signifikan terhadap sector UMKM dengan nilai $\text{sig}.0,000 > 0.005$. FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sector UMKM dengan nilai $\text{sig}.0.021 < 0.005$. ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sector UMKM dengan nilai $\text{sig}.0.043 < 0.005$. CAR tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai $\text{sig}.0.852 > 0.005$. hasil menunjukkan bahwa secara simultan variabel NFP, FDR, ROA, dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan sector UMKM dengan nilai $\text{sig}.0.000$.

perbedaan penelitian ini dengan penelitain penulis yaitu terdapat pada studi penelitiannya pada perbankan syariah FDR, ROA. sedangkan penelitian yang penulis pakai studinya pada BPRS. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti pengaruh terhadap pembiayaan umkm, dan variabel independen yaitu *capital adequacy ratio* (CAR).⁵⁵

⁵⁵ Luthfia Fajriaty, *Pengaruh FDR,ROA dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia.(periode 2013-2017)*. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Penelitian yang dilakukan H.Muklis/ Thoatul wahdaniyah (2016). yang berjudul “Pengaruh DPK, Inflansi, dan NPF Terhadap pembiayaan UKM, studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013”. Hasil penelitian keberlangsungan UKM sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dan pembiayaan UKM dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah DPK, Inflansi dan NPF.ketiganya mampu menjelaskan perubahan sebesar 98,6% yang secara parsial dengan *level of signifikan* 0,05 ketiga variabel dependen mempengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan UKM kecuali tingkat inflansi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar -636,008. Secara berurut paling berpengaruh adalah DPK, kemudian NPF dan terakhir factor inflansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu studi dan periode, penelitian terdahulu pada Bank Syariah periode 2012-2013 sedangkan penulis menggunakan study pada BPRS dan variabel x pada penelitian sebelumnya menggunakan dpk, inflansi dan npf. Persamaan penelitian sama-sama meneliti terhadap pembiayaan UKM.⁵⁶

3. Penelitian yang dilakukan Eva Nurul Khasana (2018). Yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017”. Hasil penelitian dana pihak ketiga (DPK), berpengaruh positif dan

⁵⁶ H.Muklis,Thoatul Wahdaniyah, *Pengaruh DPK, Inflansi, dan NFP Terhadap Pembiayaan UKM*, studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013. Jurnal Islaminomic Vol .v. No.2, Agustus 2016.

signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. *Non performing fincing* (NPF), tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM dan *capital adequacy ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM.⁵⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada study penelitaian pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017, sedangkan peneliti pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode 2015-2017. Persamaanya pada variabel independen yaitu CAR, DPK dan NPF .

4. Penelitian yang dilakukan Wuri Arianti N.P (2011). Yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio*(CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah”. (Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR,NPF, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0.000 yang lebih kecil dari signifikan 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap pembiayaan adalah 98,9% sebagaimana ditunjukan oleh besarnya adjusted R² sedangkan sisanya 1,1%

⁵⁷ Eva Nurul Khasana. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing(NPF) dan Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017*. Skripsi Iain Surakarta.

dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian.

Perbedaan penelitian dengan penulis pada studi penelitian dan periodenya, peneliti sebelumnya menggunakan empat variable, Persamaan penelitian ini pada variabel independennya yaitu CAR, DPK dan NPF.⁵⁸

5. Penelitian yang dilakukan Ahmira Ahmad Nahrawi (2017). Yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy ratio*(CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah (periode 2011-2015)”. Hasil penelitian pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa nilai *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif dan memiliki keeratan hubungan yang kuat. Dan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh H0 ditolak, dan hasil analisis statistic menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap

⁵⁸ Wuri Arianti N.P Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Perpoming Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011). Skripsi Universitas Diponogoro Semarang.

pembiayaan murabahah. Secara parsial *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan H0 ditolak.⁵⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada study penelitian dan periodenya dan variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel x nya 3 yaitu car, roa dan npf sedangkan objek peneliti terdahulu di bank bni syariah sedangkan penelitian sekarang pada bprs. Persamaanya pada variabel independen sama-sama menggunakan CAR dan NPF.

6. Penelitian yang dilakukan Dika Meidawati (2018) yang berjudul “pengaruh dana pihak ketiga, dan Non performing financing terhadap alokasi pembiayaan Umkm pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian secara simultan dana pihak ketiga dan non performing financing berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan umkm pada perbankan syariah periode 2013-2017. Dan secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan umkm pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017 dan non performing financing

⁵⁹ Ahmira Ahmad Nahrawi. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah (periode 2011-2015)*. Jurnal Perisai, Vol .1(2), April 2017.

berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi pembiayaan Umkm pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017⁶⁰

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel yaitu dana pihak ketiga dan non performing financing sedangkan penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu car, dpk, dan npf. Persamaanya pada variabel dependen yaitu pembiayaan umkm

7. Penelitian yang dilakukan Rina Destiana (2016) yang berjudul “Analisis dana pihak ketiga dan rasio terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia 2010-2013”. Hasil penelitian bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia dan secara rasio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.⁶¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen dan dependen serta metode penelitian yaitu terdahulu menggunakan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan

⁶⁰ Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. (periode 2013-2017). Skripsi Universitas Islam Negeri Lampung

⁶¹ Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Rasio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Logika, Vol XVI, No2 Agustus 2016.

kuantitatif, penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen 2 sedangkan peneliti sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu Car,dpk dan npf. Dan penelitian sebelumnya berfokus terhadap pembiayaan mudharabah dan musyaraka, dan penelitian sekarang berfokus pada pengaruh pembiayaan UMKM. Dan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan rasio dana pihak ketiga.

I. Kerangka Berfikir

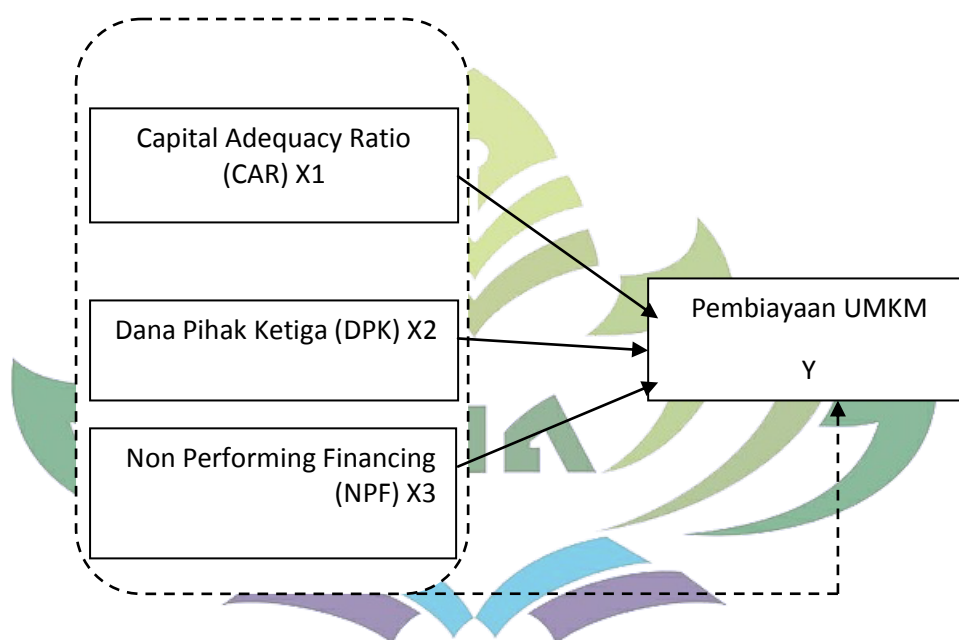
Dalam kerangka berfikir ini penulis mencoba untuk menguraikan apakah ada pengaruh hubungan antara variabel independen yaitu *capital adequacy raio* (X1), Dana Pihak Ketiga (X2) Dan *Non Performing Financing* (X3) terhadap pembiayaan UMKM.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, semakin banyak kecukupan modal bank maka dapat dikatakan bank dalam kondisi baik dan kemampuan bank untuk menutupi kerugian dari pembiayaan bermasalah. Dan semakin besar kecukupan modal maka semakin besar dalam pembiayaan UMKM. BPRS berfungsi sebagai *intermediasi* dan fungsinya dapat dilihat pada variabel dana pihak ketiga, semakin besar dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat maka semakin besar tingkat pembiayaan UMKM yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam penyaluran pembiayaan bertujuan memperoleh keuntungan meskipun resiko-resiko pembiayaan.

Resiko pembiayaan yang timbul dari berbagai pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah (*Non Performing Pinancing*) yang dapat mengganggu tingkat kesehatan BPRS, apabila tingkat NPF tinggi maka akan berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan UMKM

Berdasarkan uraian dari landasan teori di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

————— : Hubungan Secara Parsial

----- : Hubungan Secara Simultan

Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menguraikan sebagai berikut:

- 1) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yaitu CAR (X1), DPK (X2), NPF (X3).

- 2) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu pembiayaan UMKM (Y).

J. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian, dimana rumus masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁶²

Jadi hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang peneliti rumuskan dan akan diuji kebenarannya. Sehingga Apakah diterima atau ditolak hipotesis tersebut. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikir diatas, maka perumusan hipotesis ini yaitu :

a. Secara Parsial

- 1) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal bank menunjukkan bank dalam keadaan yang dinyatakan kedalam suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). Menurut teori Wangsawidjaja Semakin besar jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin lancar bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Wati Nurbaiti secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan

⁶² Sugiyono, *Metopen Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64.

⁶³ A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*, h. 117

terhadap pembiayaan bagi hasil. dan signifikan terhadap pembiayaan umkm pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Menurut Penelitian Mahda Afsari dalam jurnalnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode (2014-2016). Dan menurut penelitian Siti Anisyah Kusmyanti dalam jurnalnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2015-2017). Dari teori dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa CAR meningkat sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah juga meningkat. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu

$H_{01} = \text{Capital Adequacy Ratio}$ tidak berpengaruh signifikan Terhadap pembiayaan UMKM

$H_{a1} = \text{Capital Adequacy Ratio}$ secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM

2) Pengaruh Dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. menurut teori Muhammad, Semakin meningkat dana pihak ketiga

maka semakin meningkat dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah.⁶⁴

Menurut penelitian yang dilakukan Eva Nurul Khasanah dalam jurnalnya secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2015-2017), Menurut Penelitian Nur Faiziah secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan syariah (2011-2015) Dan Menurut Penelitian Ajeng secara Parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM pada BPRS (2010-2015). Dari teori hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkat Dana Pihak Ketiga maka pembiayaan yang disalurkan meningkat. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu

H₀₁ = Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM

H₀₂ = Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM

3) Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

⁶⁴ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...., h. 271

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. teori Syafi'I Antonio Semakin rendah tingkat NPF maka semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan, dan sebaliknya semakin tinggi NPF semakin rendah pembiayaan yang disalurkan.⁶⁵ Maka semakin meningkat resiko pembiayaan bermasalah maka penyaluran pembiayaan akan menurun dan akan berakibat terhadap profitabilitas bank.

Menurut penelitian yang dilakukan Eva dalam penelitiannya menunjukkan hasil secara parsial *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2015-2017). Menurut Penelitian Wuri dalam penelitiannya secara parsial *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah (2001-2011) dan Menurut Penelitian Ratu dalam penelitiannya secara parsial *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (2011-2015) Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat NPF maka semakin menurun pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Melihat NPF semakin meningkat maka peneliti menduga bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, karena

⁶⁵ Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syariah dari Teori dan Praktik..., 145

semakin meningkat NPF maka penyaluran pembiayaan menurun
Maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu:

H_{01} = *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan umkm

H_3 = *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM

b. Secara Simultan

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luthfia Fajriaty dalam jurnalnya secara simultan variabel NPF, FDR, ROA, dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan sector UMKM, menurut penelitian Ahmira Ahmad Nahrawi dalam jurnalnya secara simultan CAR, ROA, dan NPF memiliki hubungan positif dan memiliki hubungan keeratan terhadap pembiayaan murabahah, menurut penelitian Wuri Arianti dalam jurnalnya secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah dan Menurut menurut penelitian Cahaya dalam jurnalnya secara simultan NPF, DPK dan Inflansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan UKM. dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu

H_{01} = *Capital Adequacy Ratio* , Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

H_{a1} = *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan data yang didapatkan dari web Otoritas Jasa Keuangan. Dan menggunakan data bulanan periode 2013-2017.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan untuk umum⁶⁶. Penelitian ini menggunakan analisis statistic dengan bantuan *Eviews* 8.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁶⁷ Poulasi dalam penelitian ini yaitu Bank Perkreditan

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 147

⁶⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 80

Rakyat Syariah di Bank Indonesia dan Statistic Perbankan Syariah periode 2013-2017.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁸ Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. adapun karakteristik dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu: sampel data dalam penelitian ini 60 sampel (data) yang diperoleh dari data bulanan yaitu dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 dan waktu yang tergolong lengkap.

4. Jenis dan Sumber Data

penelitian ini menggunakan data dengan kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 maka data dalam penelitian ini termasuk ke dalam data *time series*. Data *time series* adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu (harian, mingguan, bulan, tahun).⁶⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini pembiayaan UMKM, *Capital adequacy ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Dan jenis data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatu, jurnal, catatan,

⁶⁸ *Ibid*, h. 81.

⁶⁹ V Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 39

buku-buku, artikel dan baik media perantara website yang telah dipublikasikan maupun dari kepustakaan berdasarkan *literatur* terkait penelitian.

5. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Penelitian

a. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi dan kemudian ditarik kesimpulan.⁷⁰ Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1) Variabel Independen

Variabel independen dalam bahasa indonesia disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁷¹ Dalam penelitian ini variabel bebas (X) yaitu :

a) Capital Adequacy Ratio (X1)

2) Dana Pihak Ketiga (X2)

3) Non Performing Financing (X3)

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam bahasa indonesia disebut variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi

⁷⁰ *Ibid*, h. 38

⁷¹ *Ibid*, h. 39.

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah Pembiayaan UMKM (Y).

b. Defenisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependend

Pembiayaan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam semua sector ekonomi. Skala pengukuran yaitu : laporan keuangan.

b. Variabel Independen

- 1) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal sebagai penanggung segala resiko yang terjadi. dan semakin tinggi tingkat kecukupan modal baik menunjukan indikator sebagai bank yang sehat dan mampu membiayai kegiatan operasional sehingga memberikan kontribusi bagi profitabilitas bank.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

- 2) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun berasal masyarakat yang meliputi masyarakat individu maupun badan usaha dalam bentuk simpanan .

$$DPK = \frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} = 10\%$$

- 3) *Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan bank kepada nasabah.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan yang di salurkan}}{\text{Pembiayaan bermasalah sector UMKM}} \times 100\%$$

- 4) Pembiayaan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷² Data dalam penelitian Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan Keuangan yang sudah publikasi. literatur serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁷³ Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang tercantum dalam laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode yaitu :

⁷² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 100

⁷³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46

a. *Field Research*

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam runtun waktu (*time series*) yang diperoleh dari data tahunan statistic perbankan yang dijadikan sample penelitian yaitu Januari 2013 – Desember 2017

b. *Library Research*

Library Research adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan menganalisis *literature* yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

7. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini yang menggunakan analisis regresi linier berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio (kuantitatif atau numerik).

Dan rumusnya sebagai berikut.⁷⁴

$$Y = C + b_1X_1 + b_2X_2 + b_2X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pembiayaan UMKM

C = Konstan

X₁ = CAR

X₂ = DPK

X₃ = NPF

⁷⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta:Selemba Empat, 2011), h. 134

b_1 b_2 b_3 = Koefesien Regresi

e = variabel pengganggu

syarat yang harus dipenuhi dalam uji asumsi pada analisis regresi berganda yaitu :

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji heterokedasitas, uji normalitas, ujia utokorelasi, dan uji linearitas.⁷⁵ Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat layak tidaknya digunakan dalam penelitian terdiri dari :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan sdigunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak.⁷⁶

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan metode *Jarque-Bara*. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan memperhatikan angka pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* dengan ketentuan :⁷⁷

- a) Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terditribusi normal

⁷⁵ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 104

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 283.

⁷⁷ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017) h. 5.40

- b) Bila probabilitas lebih besar dari 0,05 (bila menggunakan tingkat signifikan tersebut), maka data terdistribusi normal (hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal).

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berarti kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolienaritas tidak akan terjadi pada persamaan rerresi sederhana (yan terjadi atas suatu variabel dependen dan satu variabel independen), akibat selanjutnya, statistic t cenderung lebih kecil atau koefisien rerresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. Ada beberapa indikasi adanya *multicollinearity* sebagai berikut :

- a) Jika statistic F signifikan tetapi statistic t tida ada yang signifikan.
- b) Jika R^2 relative besar tetapi statistic t tidak ada yan signifikan.

Untuk mendeteksi ada tidaknya atau tidak multikolerasi didalam model regresi dapat dilihat dari nilai dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yan umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas

3) Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasinya lebih timbul pada data yang bersifat runtunan waktu, karena berdasarkan sifat data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai data yang bersifat objektif atau disebut *cross section*. Ujian dilakukan penelitian ini adalah untuk menuji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan peganggu pada periode t dengan kesalahan peganggu pada periode $t-1$ untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dalam uji autokorelasi menggunakan uji *Breusch Godfrey serial correlations LM test*. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian maka dapat melihat nilai signifikansi *Obs*R-Squared* dengan ketentuan sebagai berikut.⁷⁸

- Jika $\text{sig } \text{Obs}^*R\text{-Squared} > 0,05$. maka data tidak terjadi autokorelasi
- Jika $\text{sig } \text{Obs}^*R\text{-Squared} < 0,05$. Maka data terjadi masalah autokorelasi.

⁷⁸ Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonomika..., h. 5. 29

4) Uji heteroskedastisitas

Diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolute residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolute residual ($\alpha = 0,05$) maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas⁷⁹

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Secara Simultan (Uji F), Uji Secara Parsial (Uji T). Untuk menguji hipotesis penelitian, maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Eviews 8*.

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai suatu variabel (X) terhadap naik atau turunnya nilai variabel (Y).⁸⁰ Koefisien Determinasi (R^2) didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%.⁸¹ Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-

⁷⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*..., h.135

⁸⁰ *Ibid* h. 236

⁸¹ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*..., h. 182

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen.

2) Uji Secara Individual atau Parsial (Uji T)

Uji T adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan satu variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).⁸² Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi α (0,05). Adapun kriteria pengambil keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai Sig < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima.
- b) Jika nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak.

3) Uji Secara Serentak atau Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan semua variabel independen (X) bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y).⁸³ Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi α (0,05). Adapun kriteria pengambil keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai Sig < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima.
- b) Jika nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak

⁸² Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis....*, h. 267

⁸³ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis....*, h. 264

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia

Bank Perkreditan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang (UU) Perbankan no 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Menurut UU Perbankan no 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersempatkan dengan itu. Sejak dikeluarkan UU No 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan.

Berdirinya BPRS tidak dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan, dan munculah pemikiran

untuk mendirikan bank syariah pada ditingkat nasional. bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPRS diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.⁸⁴

Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR Syariah ketiga BPR Syariah tersebut adalah :

- a. PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
- b. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
- c. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari menteri keuangan RI. Selanjutnya dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para perbankan, pada tanggal 25 juli 1991, BPR Dana Marghatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Mentri Keuangan RI.

Latar belakang didirikanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian di Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap

⁸⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*...., H. 94.

kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai system perbankan bagi hasil atau system perbankan islam dalam skala outlet retail banking (rural bank).

Undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah UU n0 7 tahun 1992 tentang perbankan Nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah sebagaimana disebut dalam pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Keberadaan BPRS secara Khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No 32/34/Kep/Dir, Tanggal 12 mei 1999 dan surat edaran No 32/34 KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Perkembangan bank syariah awal keberdaanya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia. dan tahun 2016 hingga saat ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebanyak 165.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, untuk mengukur variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Analisis

statistik deskriptif pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini, Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode 2015 sampai 2017.

Variabel dependen penelitian ini yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dan variabel Independenya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif



Variabel	N	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
CAR	60	7.694393	8.345218	7.715123	7.750521	0.091414
NPF	60	6.476972	7.002156	6.825996	6.797969	0.138420
DPK	60	14.90535	15.75960	15.27642	15.31018	0.240741
Pembiayaan UMKM	60	14.53668	15.17921	15.00920	14.94809	0.168930
Valid N (listwise)	60					

Sumber: Data diolah 2019.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, bahwa jumlah sampel (N) 60 masing-masing variabel yang diteliti. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu UMKM yang memiliki rata-rata (mean) sebesar 14.94809, nilai standar deviasi sebesar 0.168930 dengan nilai minimum 14.53668 dan nilai maximum 15.75960.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas data perbulan BPRS periode 2015-2017 yaitu pada data

perbulan selama periode 2015-2017 memiliki nilai minimum sebesar 7.694393, nilai maximum sebesar 8.345218 dengan nilai standar deviasi 0.091414 dengan nilai mean sebesar 7.750521 sehingga dapat disimpulkan nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai mean, ini menunjukkan bahwa simpanan data pada variabel CAR tidak terlalu besar. Dengan kata lain bahwa antara nilai minimum dan maximum pada periode pengamatan rendah, dapat dikatakan baik. Karena tidak ada kesenjangan yang relative besar pada nilai minimum dan maximum pada CAR.

Variabel Dana Pihak Ketiga hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas data perbulan BPRS periode 2015-2017 yaitu DPK menunjukkan bahwa mean sebesar 15.31018, nilai minimum sebesar 14.90535 Juta rupiah dan nilai maximum sebesar 15.75960. Serta nilai standar deviasi sebesar 0,240741. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menabung atau menginvestasikan dana pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah tinggi. sehingga dana Pihak Ketiga juga tinggi.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas data perbulan BPRS periode 2015-2017 yaitu NPF menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 6.476972, maximum sebesar 7.002156, nilai mean sebesar 6.797969 dengan standar deviasi sebesar 0.138420 standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan mean. Dan dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maximum pada periode pengamatan tergolong rendah, dan dapat dikatakan baik.

2. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji normalitas

Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data variabel-variabel dependen dan independen berdistribusi secara normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Apabila nilai signifikansi *Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Dan alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat data terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan uji Jarque-Bera Test dalam program *Eviews 8*.

Hasil analisis persamaan regresi disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

Sampel	<i>Jarque-Bare</i>	Signifikansi	keterangan
60	3.279801	0,193999	Normal

Sumber : Data diolah tahun 2019.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Jarque-Bare* sebesar 3.279801 dan nilai signifikansi sebesar 0,193999 untuk melihat data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat diketahui dengan melihat signifikansi dari hasil data uji normalitas diatas menunjukan nilai signifikan sebesar 0,193999 nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya data independen berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi sempurna antar variabel independen. suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan melihat nilai uji *Centered* VIF. Dengan ketentuan jika nilai *centered* VIF < 10 maka data dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil penilaian ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Centered</i> VIF	Keterangan
CAR	1.006169	Tidak terjadi multikolinearitas
DPK	3.930815	Tidak terjadi multikolinearitas
NPF	3.938702	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah tahun 2019.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada gambar 4.3 dengan melihat nilai *Centerd* VIF. dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, DPK, NPF. Dan nilai VIF dari variabel independen yaitu CAR sebesar 1.006169, DPK sebesar 3.9308153, dan NPF sebesar 3.938702. Nilai tersebut lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji autokolerasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah terjadinya peluang lebih besar terjadi keyakinan semakin besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Jika probabilitas *Chi Square* lebih dari tingkat signifikansi 0,05 maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Dan dapat dilihat dari angka *Prop. Chi-Square* dari hasil autokorelasi menunjukkan Eviews 8 yaitu :

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Sampel	Prop. Chi square	Keterangan
60	0.1014	Tidak Terjadi autokorelasi

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (*Breusch- godfrey*) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Prop. Chi square* sebesar 0.1014, ini menunjukkan bahwa $0,1014 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lainya, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

uji *White*. Jika nilai *signifikasi Obs*R-Squared* $< 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedasitas

Sampel	<i>Sig Obs*R-Squared</i>	Keteranang
60	0,2469	Tidak terjadi heteroskedasitas

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil dari uji heteoskedasitas (uji white) pada tabel 2.5 menunjukkan bahwa nilai *Sig Obs*R-Squared* sebesar 0,2469. Hal ini menunjukkan bahwa 0,2469 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hasil data tidak terjadi heteoskedasitas.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio dan untuk mengetahui antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel CAR, DPK dan NPF terhadap pembiayaan UMKM. Adapun hasil dari pengelolaan data yaitu :

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	Thitung	Signifikan	Kesimpulan
(Constant)		1.388491	11.38821	0,000	
UMKM					
CAR	(+)	-0.133435	-3.483079	0,0010	Diterima
DPK	(+)	0.432680	7.813541	0,0000	Diterima
NPF	(-)	0.213283	5.008588	0,0000	Diterima
Fhitung = 204.2871					
Signifikasi = 0,000000					
Adjusted R ² = 0.911790					
R-square = 0.916276					

Sumber : Data diolah 2019.

Berdasarkan hasil persamaan tabel 4.6 koefisien CAR, DPK dan NPF menunjukkan pengaruh Dengan taraf signifikan 0,05 Dan persamaan model regresi yang diperoleh yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{CAR} + \beta_2 \text{DPK} + \beta_3 \text{NPF} + e \dots$$

$$Y = 1.388491 + (-0.133435) \text{CAR} + 0.432680 \text{DPK} + 0.213283 \text{NPF}$$

Dalam persamaan regresi diatas memperoleh nilai konstan sebesar 1.388491 dan menyatakan bahwa variabel CAR, DPK dan NPF dinyatakan konstan maka dapat dinyatakan bahwa proporsi UMKM sebesar 1.388491. Adapun persamaan regresi memiliki makna yaitu:

- a. Hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien CAR -0.133435 dan signifikan sebesar 0,0010 itu artinya lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ bahwa CAR mempunyai hubungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Dan setiap kenaikan 1 point CAR mempunyai

hubungan negatif dengan catatan variabel lainya dianggap konstan, menyebabkan pembiayaan meningkatkan sebesar -13,34%

- b. Hasil uji regresi menunjukan nilai koefisien DPK sebesar 0.432680 dengan nilai signifikasi 0,0000 lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, menggambarkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Setiap kenaikan 1 point DPK, dengan asumsi variabel independen lainya konstan, dapat meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 43.26%.
- c. Hasil uji regresi menunjukan nilai koefisien NPF sebesar 0.213283 dengan nilai signifikan 0,0000 lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, menggambarkan bahwa NPF berpengaruh signifikan pembiayaan UMKM. Setiap kenaikan 1 point NPF dengan asumsi variabel Independen lainya konstan, dapat meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 21.32%.

2. Uji Koefisien Detirminasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai suatu variabel (X) terhadap naik atau turunnya nilai variabel (Y). Koefisien Determinasi (R^2) didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai *Adjusted* R^2 untuk mengetahui model rerresi manakah yang cocok dan baik untuk digunakan. Adapun hasil pengelolaan data yaitu :

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

R-squared	0.916276	Mean dependent var	2.704520
Adjusted R-squared	0.911790	S.D. dependent var	0.011345
S.E. of regression	0.003370	Akaike info criterion	-8.483711
Sum squared resid	0.000636	Schwarz criterion	-8.344088
Log likelihood	258.5113	Hannan-Quinn criter.	-8.429097
F-statistic	204.2871	Durbin-Watson stat	0.355991
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil dari pengujian koefisien determinasi Adjusted R-squared diperoleh nilai 0.911790 atau 91,17% hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh CAR, DPK dan NPF terhadap pembiayaan UMKM yaitu sebesar 0,911790 atau 91,17% sisanya 8.83% dipengaruhi variabel lainnya.

3. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji T adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan satu variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai T_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan nilai T_{tabel} menggunakan tingkat signifikan α (0,05) maka H_0 dapat ditolak dan H_a dapat diterima. dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Berdasarkan uji regresi pada tabel 4.6 Hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

a. ***Capital Adequacy Ratio(CAR)***

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0.133435 dengan nilai signifikan sebesar 0.0010 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank perkerditan rakyat syariah di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hipotesis H_{a1} dari variabel CAR di terima

b. ***Dana Pihak Ketia (DPK)***

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0.432680 dengan nilai signifikan 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia. Dapat dikatakan hipotesis H_{a2} dari variabel DPK diterima.

c. ***Non Performin Fanancing (NPF)***

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0.213283 dengan nilai signifikasi 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia. Dapat dikatakan hipotesis H_{01} dari variabel NPF ditolak dan H_{a2} diterima

4. Uji Hipotesis Secara Simultan (uji F)

Uji F adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan semua variabel independen (X) bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan uji regresi pada tabel 4.7 hasil uji hipotesis secara simultan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 204.2871 dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan variabel CAR, DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibahas dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan UMKM

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Kecukupan modal bank menunjukkan bahwa bank dalam keadaan yang dinyatakan kedalam suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dan menjadi factor penting bagi perbankan untuk mengembangkan usaha dan menampung resiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Modal merupakan aspek terpenting bagi perkembangan bank serta dapat memperlancar operasional bank.

Neraca bank bersumber dari modal yang dilihat dari sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan, rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari keuntungan yang sengaja tidak dibagikan kepada pemegang saham digunakan untuk ekspansi usaha dan menjaga likuiditas bank karena adanya kredit- kredit yang meragukan yang berpotensi kredit macet.⁸⁵

Kecukupan modal suatu bank menggambarkan jika bank tersebut dalam kondisi baik dan memberikan tingkat kepercayaan bagi masyarakat mengenai kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan ditetapkannya ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Katagori CAR sehat telah memenuhi tingkat wajar yang sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia menetapkan rasio sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko sehingga bank diharapkan dapat menjaga CAR berada pada kisaran ketentuan BI tersebut.

Hasil penelitian secara parsial variabel *Capital adequacy ratio* (CAR) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. dengan demikian hipotesis H_{a1} yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistic yaitu koefisien -0.133435 dengan signifikan $0.0010 < 0,05$.

⁸⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah....*, h. 135

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eva (2018) “analisis pengaruh dana pihak ketiga (dpk), *non performing financing* (npf) dan *capital adequacy ratio* (car) terhadap alokasi pembiayaan umkm pada bank umum syariah periode 2015-2017” yang mengatakan bahwa secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan tingkat koefisien sebesar -2097 dan Signifikan sebesar 0,044. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmira Ahmad Nahrawi (2017) “Analisis *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Return On Asset (ROA) *Non performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah periode 2011-2015” yang mengatakan bahwa secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan tingkat koefisien sebesar 0,000.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis penelitian diatas bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. menurut Mahda bahwa hasil analisi penelitiannya mengatakan kecukupan modal digunakan untuk penunjang operasional bank perkerditan rakyat syariah jua untuk melindungi para deposan untuk menyana semua kerugian pada perusahaan. Dan modal juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo serta dalam

penyaluran pembiayaan kepada nasabah.bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan modal yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori wangsawidjaja yang mengatakan bahwa semakin besar kecukupan modal maka pembiayaan yang akan disalurkan juga meningkat. Dan dalam pemberian kredit pembiayaan kecukupan modal juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan kecukupan modal yang tinggi maka pihak bank dalam memberikan pembiayaan juga meningkat dengan meningkatnya pembiayaan akan menguntungkan pihak bank dimana profitabilitas bank bertambah.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan UMKM.

Dana Pihak Ketiga adalah Merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Jadi dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat dan badan usaha digunakan untuk kegiatan operasional bank, simpanan dalam bentuk simpanan giro tabungan, deposito.

Dalam perspektif ekonomi islam Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasional bank merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu menyalurkan pembiayaan dari dana tersebut. Dalam perbankan syariah terdapat tiga sumber dana yaitu giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah . DPK yang dikumpulkan dari dana pihak ketiga kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk akad pembiayaan, maka akan

dibutuhkan banyak dana cadangan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu nasabah menarik kembali dananya dari bank.

Hasil penelitian secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Dengan demikian hipotesis H_{a2} diterima yang menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, hal ini dibuktikan dengan hasil statistic yaitu koefisien sebesar 0.432680 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nur Faizah (2017) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015” yang mengatakan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan tingkat Signifikan 0,000. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Eva (2018) “analisis pengaruh dana pihak ketiga (dpk), *non performing financing* (npf) dan *capital adequacy ratio* (car) terhadap alokasi pembiayaan umkm pada bank umum syariah periode 2015-2017” yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan tingkat Signifikan 0,000. Dan penelitian sejalan dengan penelitian Cahya (2013) “Pengaruh NPF, DPK dan Inflansi terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil dan menengah (UKM) Pada

BPRS di Indonesia” yang menyamtakan bahwa secara parsial variabel Dana Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan tingkat Signifikan 0,000.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis penelitian diatas bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. sehingga semakin meningkat Dana Pihak Ketiga maka semakin meningkat penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dipengaruhi oleh dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana terbesar. DPK sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank. Karena penyaluran pembiayaan sebagai prioritas bagi bank untuk meningkatkan profitabilitas, dan menyalurkan dana semaksimal mungkin.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM

NPF adalah pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Jadi NPF adalah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah membayar kredit yang telah disepakati diawal.

Hasil penelitian secara parsial variabel *Non Performin Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Dengan demikian hipotesis H_{a3} diterima yang menyatakan *Non Performin*

Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, hal ini dibuktikan dengan hasil statistic yaitu koefisien sebesar 0.213283 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mukhlis (2017) “Pengaruh DPK, Inflansi dan NPF terhadap Pembiayaan UKM pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013” yang menyatakan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan UKM dengan tingkat signifikan sebesar 0,019. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nur Faizah (2017) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015” yang menyatakan bahwa secara parsial NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM dengan tingkat signifikan sebesar 0,003, dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahda (2017) “Pengaruh CAR, ROA, NPF dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM pada BPRS di Indonesia Periode 2012-2016” menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan signifikan 0,000.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Hal ini dikarenakan perbankan syariah belum melakukan penataan dalam penyaluran pembiayaan, sehingga Pembiayaan bermasalah

meningkat kemudian bank melakukan penyeleksian dalam pemberian kredit.

Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin beresiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank, akan tetapi hal ini sejalan dengan pembiayaan karena semakin meningkat pembiayaan maka resiko pembiayaan bermasalah akan muncul. Dan Semakin beresiko pembiayaan maka modal yang dicadangkan semakin besar dan makin kecil kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan hal ini akan menyebabkan profitabilitas menurun. Akan tetapi kegiatan pembiayaan yang dilakukan perbankan tetap berjalan meskipun NPF meningkat selama pembiayaan bermasalah masih berada pada batas aman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Antonio syafi'I yang mengatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan semakin rendah tingkat NPF semakin kecil jumlah pembiayaan yang dikeluarkan, dan sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan yang akan disalurkan meningkat, semakin ketat pembiayaan yang disalurkan bank akan menyebabkan tingkat pembiayaan oleh masyarakat menurun. Dalam penelitian ini variabel NPF berpengaruh secara positif yang artinya pembiayaan yang disalurkan menurun dan dapat menyebabkan berkurangnya modal bank, karena bank wajibkan membuat Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang dapat berdampak terhadap bagi hasil kepada nasabah simpanan.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Pinancing* Secara Simultan terhadap Pembiayaan UMKM

Dari hasil uji regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing pinancing* pada BPRS di Indonesia periode 2013-2017 berdasarkan hasil uji regresi dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa CAR, DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2011) “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Non Performin Financing (NPF) dan Retrun On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan periode 2001-2011” yang mengatakan bahwa variabel DPK, CAR, NPF dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ratu (2017) “Analisis Pengaruh Dpk, Npf, Car, Modal sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah periode 2011-2015” yang mengatakan bahwa variabel DPK, CAR, NPF dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Cahya (2013) “Pengaruh NPF, DPK dan Inflansi terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil dan menengah (UKM) Pada

BPRS di Indonesia” yang mengatakan bahwa variabel CAR, DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

Hah ini karena variabel CAR, DPK dan NPF merupakan secara simultan rasio keuangan yang mempengaruhi dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang dimana jika Kecukupan Modal (CAR) tinggi maka candangan untuk pembiayaan beresiko akan meningkat dan keuangan bank dalam kondisi baik, dan dana pihak ketiga memiliki peranan dalam penyaluran pembiayaan karena semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka pembiayaan yang disalurkan meningkat dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan maka dapat menambah profitabilitas bank. Selain kecukupan modal (CAR) dan dana pihak ketiga (DPK) ada rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dimana ketika penyaluran pembiayaan meningkat maka pembiayaan bermasalah meningkat hal ini sejalan dengan penyaluran pembiayaan dengan resiko yang akan di tanggung oleh pihak bank. Karna tidak semua pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat berjalan lancar akan tetapi ada juga pembiayaan yang berisiko.

Maka dari tiga variabel independen secara simultan yaitu: CAR, DPK, NPF Dapat ditarik kesimpulan masing-masing rasio memiliki pengaruh dalam penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Perkerditan Rakyat Syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

1. Hasil uji parsial bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan tingkat signifikan sebesar 0.0010 dan koefisien sebesar - 0.133435 maka dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kecukupan modal digunakan sebagai modal kepercayaan masyarakat terhadap bank karena semakin meningkat kecukupan modal maka bank dalam kondisi baik, sehingga semakin besar kecukupan modal maka dalam menyalurkan pembiayaan meningkat
2. Hasil uji parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan koefisien sebesar 0.432680 maka dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia .hal ini dikarenakan semakin besar dana pihak ketiga maka semakin besar pula bank menyalurkan pembiayaan pada UMKM. Karena tujuan bank adalah profit maka, tidak mungkin bank tidak menggunakan dana yang

ada akan tetapi bank cenderung untuk menyalurkan dana semaksimal mungkin.

3. Hasil uji parsial variabel *Non Performin Financing* (NPF) dengan tingkat signifikan 0.000 dan koefisien sebesar 0.213283 maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Jika tingkat NPF rendah maka pihak bank akan mengoptimalkan pembiayaan umkm untuk memperoleh pendapatan maksimal. Dan apabila NPF meningkat maka akan menyebabkan fungsi intermediasi bank secara optimal mengurangi perputaran dana yang mengakibatkan menurunnya pendapatan bank. Dan besar kecilnya NPF dijadikan pertimbangan bagi pihak bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

4. Dari hasil uji regresi pada tabel 4.6 menunjukan bahwa secara simultan variabel *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing pinancing* pada BPRS di Indonesia periode 2013-2017 berdasarkan hasil uji regresi dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa CAR, DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2011), Lutfiah (2018), dan Cahaya (2013) yang mengatakan bahwa variabel CAR, DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis memberikan masukan dan saran pihak yang terkait yaitu :

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk yang dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan syariah sehingga memaksimalkan tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, dan bank juga harus memperhatikan rasio keuangan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dalam melakukan penyaluran dana menerapkan prinsip kehati-hatian dan dapat menjaga tingkat *Capital Adequacy Ratio* diatas 8% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan pihak bank juga dapat menjaga rasio pembiayaan bermasalah yaitu 5% dari total pembiayaan bermasalah.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut, serta dijadikan sebagai bahan referensi tambahan

dan menggunakan variabel–variabel yang lebih banyak dan menambah periode waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Pustaka Alvabet 2009.
- Basuki Agus Tri, Prawoto Nano, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, Edisi Kedua Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Harianto Farid, Sudomo Siswanto, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal* Jakarta: PT.Bursa Efek Jakarta, 1998.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
-, *Manajemen Perbankan* Jakart: Prenada Media, 2010.
- Kadir, *Statistikika Terapan Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian*, Edisi Kedua Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Uman Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah Bandung* : Pustaka Setia, 2013.
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012
- Mulyat Ettyi , *Kredit Perbankan* Bandung: Pt. Refika Aditama, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
-, *Manajem Dana Bank Syariah*, Depok : Pt Rajagrafindo Persada 2014.
- Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Perumus PAPI Tim, *Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia* Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

Uman Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2015.

Sugiyono, *Metopen Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010.

Suryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta 2014.

Sujarweni V Wiratna, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2015.

Ferry, *Manajemen Rasio Perbankan* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.

Fahmi Irfhab, *Glosarium Ilmu Manajemen Akutansi* Bandung: Alfabeta, 2013

Tri Basuki Agus, Prawoto Nano, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah* Bandar Lampung: Aura, 2016

Rivai Veithzal dkk, *Islamic Financing Mangement* Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Wahyudi Imam Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Wijaya David, *Akutansi Umkm*. Yogyakarta, Gava Media, 2018.

Winarno Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2017.

Jurnal dan Skripsi

- Ahmira Ahmad Nahrawi, Pengaruh *Capital Adequacy ratio*(CAR), *Return On Assets*(ROA) dan *Non Performing Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah (periode 2011-2015). Jurnal Perisai, Vol .1(2), April 2017.
- Ajeng Nuzul Astuti, Pengaruh Car, Dpk dan Npf Terhadap Pembiayaan Umkm pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia periode 2010-2015. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dika Meidawati, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia (periode 2013-2017). Skripsi Universitas Islam Raden Intan, Lampung
- Eva Nurul Khasana, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK), Non Performing Financing(NPF) dan Capital Adequacy Ratio(CAR) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017*. Skripsi Iain Surakarta.
- H. muklis/ Thoatul Wahdaniyah, *Pengaruh Dpk Infansi dan Npf Terhadap Pembiayaan UKM, studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013*. Jurnal Islaminomic Vol .v. No.2, Agustus 2016
- Ira Maya Hapsari, “*identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi oleh Ukm dan Peninjauan Kembali Regulasi Ukm Sebagai Langkah Awal Revitalisasi ukm*”, jurnal fermana, Volume v, No 02, 2014.
- Luthfia Fajriaty, *Pengaruh FDR,ROA dan CAR terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia*.(periode 2013-2017). Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Rasio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Logika, Vol XVI, No2 Agustus 2016.
- Siti Haura Ibtisamah, *Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Umkm* (2017).
- Wuri Arianti N.P, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK), Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Perpoming Financing(NPF), dan Return On Asset(ROA) terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah*. (Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011). Skripsi Universitas Diponogoro Semarang.

Website

Jumlah Pelaku UMKM. (On-line) tersedia di: <http://www.keuangan.kontan.co.id> (22 Februari 2019).

Isu Pembiayaan Ekonomi Kreatif Dan Kreatif. (On-line), tersedia di: <http://www.ui.ac.id/berita/umkm-2018.html> (22 februari 2019).

Penetapan Plafon Pembiayaan. (On-line), tersedia di: www.ojk.go.id (22 Februari 2019).

Peraturan Bank Indonesia. (On-line), tersedia di: www.bi.go.id, (24 Februari 2019)

Peraturan Bank Indonesia. (On-line), tersedia di: www.bi.go.id, (24 Februari 2019)

Peraturan Undang-Undang Tentang UMKM. (On-line) <https://www.ojk.o.id> (20 Januari 2019)

